



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI, DANA UMUM, ALOKASI KHUSUS DAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016-2023

Candra Ismayasari^{a*}, Yuwita Ariessa^b, Wikan Budi^c

^a Program Studi Akuntansi, Candraayumi13@gmail.com, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo

^b Program Studi Akuntansi, Yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo

^c Program Studi Akuntansi, Budiutamiwikan@gmail.com, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo

*correspondence

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of local revenue, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds on government financial performance. The population of this study observed the financial reports for the realization of the APBD for the former Surakarta Residency via the website www.djpk.kemenkeu.go.id for the 2016-2023 fiscal year. Based on the observations made, it was found that the regional original income variable did not have a significant effect on the financial performance of the former Surakarta residency government in 2016-2023. The general allocation fund variable has a significant negative effect on the financial performance of the former Surakarta residency government in 2016-2023. The special allocation fund variable does not have a significant effect on the financial performance of the former Surakarta residency government in 2016-2023. The profit sharing variable does not have a significant effect on the financial performance of the former Surakarta Residency government in 2016-2023.

Keywords: regional original revenue, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds, government financial performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah. Populasi penelitian ini mengamati dari laporan keuangan realisasi APBD se-Eks Karesidenan surakarta melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id tahun anggaran 2016-2023. Dengan pengamatan yang dilakukan didapatkan variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan Eks karesidenan Surakarta tahun 2016-2023. Variabel dana alokasi umum berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Eks karesidenan Surakarta tahun 2016-2023. Variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Eks karesidenan Surakarta tahun 2016-2023. Variabel bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2023.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, kinerja keuangan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan mengikuti kemajuan pada setiap daerah di Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan menekankan peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Otonomi adalah salah satu cara pemerintah daerah menjalankan kewenangan mereka [1]. Menurut [2], ada beberapa perspektif tentang bagaimana menerapkan otonomi dan desentralisasi wilayah dengan hati-hati. Untuk mencapai otonomi dan desentralisasi yang besar, jelas, dan bertanggung jawab, manajemen finansial wilayah harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengatur kebijaksanaan finansial wilayah dengan biaya yang terjangkau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. Pemerintahan daerah memiliki otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Anggaran disusun sebelum alokasi belanja modal. Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari data APBD[3]. Dari sisi pendapatan, kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Dari perspektif pengeluaran, dapat dilihat kecenderungan pola belanja daerah suatu daerah cenderung membelanjakan dananya untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan aparatur.

Otonomi daerah dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah serta Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan [3]. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, desentralisasi adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Indikator keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Laporan pertanggung jawaban pemerintah tentang realisasi anggaran ada beberapa ukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan mereka. Ini termasuk desentralisasi, ketergantungan, kemandirian, efisiensi, rasio kesersian, dan pertumbuhan [4]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut [5] merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Daerah harus menggali sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum, juga dikenal sebagai DAU, adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk memfasilitasi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan memenuhi kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama atau kuat, jadi dana ini dialokasikan untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal di seluruh negara. Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berasal dari pendapatan APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah [6]. Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diberikan kepada daerah dengan melihat potensi daerah tersebut [7].

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja sebelumnya dengan melakukan berbagai analisis. Posisi keuangan yang dihasilkan menunjukkan keadaan keuangan entitas dan potensi kinerja masa depan. Untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan harus dilakukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, diperlukan metode untuk memaksimalkan keuangan daerah karena hasil dari pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan perspektif tambahan tentang pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah [8].

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah adalah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Dana bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Untuk mengidentifikasi dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Untuk mengidentifikasi dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Untuk mengidentifikasi dana bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori stewardship, juga dikenal sebagai teori pengelolaan (penata layanan), menjelaskan bagaimana seorang manajer bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan integritas kepada orang lain dengan mengabaikan kepentingan individu [9]. Teori ini menggambarkan keberadaan korelasi yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Asumsi filosofis dari teori stewardship adalah individu dapat percaya, mempunyai tanggung jawab dalam bertindak. Terdapat fenomena yang dikaji dari persentase PAD yang digunakan untuk belanja daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2021 rata-rata berkisar antara 10-19,9%. Ini menunjukkan bahwa beberapa pemerintah kabupaten dan kota masih menggunakan PAD kurang dari 10%, yang berarti belanja daerah mereka masih bergantung pada Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH). Permasalahan ini menunjukkan bahwa fenomena Fly Paper Effect, di mana kondisi pemerintah daerah menanggapi belanja daerah lebih banyak dari dana transfer daripada pendapatan asli daerah, dapat menyebabkan belanja daerah terbuang. Dengan peningkatan dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah, seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mengimbangnya dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana publik [10]. Terdapat kesenjangan pada teori ini adalah bahwa pemerintah daerah harus berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan, mengelola, dan memanfaatkan aset pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, keadaan ini sesuai dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik sangat terkait [11].

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah ukuran pengelolaan keuangan organisasi yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut [12] Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja dalam bidang keuangan daerah, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah, menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerima di wilayahnya sendiri menurut [13]. Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang berganung pada kondisi ekonomi secara umum dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, Pasal 6 menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

2.3.1 Pendapatan asli daerah sendiri yang sah

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lain yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.3.2 Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari

- a. Sumbangan dari pemerintah
- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
- c. Pendapatan lain yang sah

2.4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk memperlakukan kemampuan antar daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi ini merupakan bagian yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah pada setiap tahunnya. Kebijakan perimbangan keuangan berdampak pada meningkatnya disparitas kemampuan keuangan antara

daerah, karena tiap daerah memiliki kemampuan finansial yang beragam. Untuk mengatasi disparitas tersebut, Pemerintah Pusat mengambil langkah memberikan subsidi berupa Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah. Secara sederhana, daerah yang memiliki potensi Pendapatan Bukan Pajak (PBB) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar akan menghasilkan pendapatan yang 25 signifikan, sedangkan daerah dengan potensi kecil akan memiliki pendapatan yang lebih rendah. Pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mengurangi disparitas tersebut. Ini berarti bahwa daerah dengan kemampuan keuangan yang relatif besar akan menerima DAU yang lebih kecil, sementara sebaliknya untuk daerah dengan kemampuan keuangan yang lebih kecil akan menerima DAU yang lebih besar [14].

2.5 Dana Alokasi Khusus

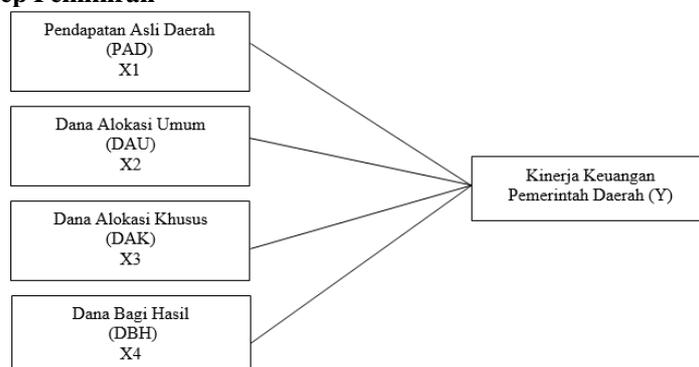
Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Dasar hukum yang mengatur mengenai DAK mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. penggunaan dana perimbangan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan kebutuhan infrastruktur, seperti fasilitas dasar yang merupakan urusan daerah, seperti program-program dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta yang lainnya, sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2.6 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil yang disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil bagian daerah terdiri atas:

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat, 90% untuk pemerintah daerah
- b. Bagian yang diterima oleh daerah dari Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah bagian dari pemerintah negara yang berasal dari pembayaran atas hak tanah dan bangunan yang kemudian dibagi dengan kompensasi sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Sebanyak 16% akan dialokasikan untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas milik daerah provinsi tersebut.
 - 2) Sebesar 64% diberikan kepada daerah kabupaten/kota yang menghasilkan dan akan dialokasikan ke rekening kas daerah kabupaten/kota tersebut.
- c. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam penerimaan negara dari sumber daya alam kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2.7 Kerangka Konsep Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Hipotesis penelitian yang muncul pada penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah

H2 : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

H4 : Dana bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menekankan pengujian teori-teori dengan variabel X dan Y. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan data dokumentasi yang dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan yang dibutuhkan secara online dan dengan mempelajari dari catatan dokumentasi yang sudah ada. Populasi untuk penelitian ini seluruh populasi laporan Realisasi APBD se-Eks Karesidenan Surakarta melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id tahun anggaran 2016-2023 yang meliputi 6 daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability* sampling yang akan digunakan adalah sampel jenuh. Regresi linear berganda digunakan ketika penelitian melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\{Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e\}$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α = Nilai Konstanta

β = Koefisien Regresi Variabel $X_{1,2,3,4}$

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Alokasi Khusus

X_4 = Dana Alokasi Bagi Hasil

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Tabel 1 statistic deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pendapatan asli daerah	56	0,00138	0,34342	0,1735516	0,07490878
Dana alokasi umum	56	0,38511	0,56285	0,4539246	0,03651518
Dana alokasi khusus	56	0,04042	0,47705	0,1530888	0,05285057
Dana bagi hasil	56	0,00979	0,18052	0,0235745	0,02234719
Kinerja keuangan	56	1.172350	2.060820	1.48820839	0.169772879
Valid N (Listwise)	56				

Sumber: Hasil olahan data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel diatas hasil dari Uji Statistik Deskriptif untuk 5 variabel sebanyak 56 sampel adalah sebagai berikut:

- Untuk variabel pendapatan asli daerah hasil statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00138 sedangkan nilai maksimum yaitu 0.3442. Nilai rata rata sebesar 0.1735516 dengan standar deviasi sebesar 0.07490878. dengan demikian pendapatan asli daerah dalam ketegori bak karena std. deviasi menunjukan nilai lebih rendah dari mean.
- Untuk variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai minimum sebesar 0,38511 sedangkan nilai maksimum yaitu 0.56285 Nilai rata rata sebesar 0.4539246 dengan standar deviasi sebesar 0.03651518. dengan demikian pendapatan asli daerah dalam ketegori bak karena std. deviasi menunjukan nilai lebih rendah dari mean.
- Untuk variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai minimum sebesar 0,04042 sedangkan nilai maksimum yaitu 0.47705. Nilai rata rata sebesar 0.1530888 dengan standar deviasi sebesar 0.05285057. dengan demikian pendapatan asli daerah dalam ketegori bak karena std. deviasi menunjukan nilai lebih rendah dari mean.
- Untuk variabel dana bagi hasil menunjukkan nilai minimum sebesar 0.00979. sedangkan nilai maksimum yaitu 0.18052. Nilai rata rata sebesar 0.0235745 dengan standar deviasi sebesar 0.02234719. dengan demikian pendapatan asli daerah dalam ketegori bak karena std. deviasi menunjukan nilai lebih rendah dari mean.

- e. Untuk variabel kinerja keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,172350 sedangkan nilai maksimum yaitu 2.060820. Nilai rata rata sebesar 1.48820839 dengan standar deviasi sebesar 0.169772879. dengan demikian pendapatan asli daerah dalam ketegori bak karena std. deviasi menunjukan nilai lebih rendah dari mean.

4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi tersebut dapat dianggap normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Pengujian penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam hal ini, hasil dari analisis data menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig. sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bhaswa data tersebut berdistribusi normal.

4.3 Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas terdapat dua persamaan dengan persamaan awal tidak memasukkan interaksi dengan variabel moderasi. Sementara persamaan kedua memasukkan pengujian interaksi dengan variabel moderasi. Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai VIF yang sama dengan 1,233 dengan nilai *tolerance* 0,811. Variabel Dana alokasi umum nilai VIF yang sama dengan 1,404 dengan nilai *tolerance* 0,712 Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai VIF yang sama dengan 1,100 dengan nilai *tolerance* 0,909. Variabel dana alokasi bagi hasil memiliki nilai VIF yang sama dengan 1,098 dengan nilai *tolerance* 0,911. Keempat variabel tersebut menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.3 Uji Autokorelasi

Tabel 2 Hasil uji autokorelasi

Model	R	R.Square	Adjusted Square	R	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,755 ^a	0,496	0,457		0,125102399	1,546

Sumber: Hasil olahan data sekunder (2024)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima artinya tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 3 Perbandingan hasil uji autokorelasi

N	K	DW	DL	DU	4-DL	4-DU
56	4	1,546	1,7246	1,4201	2,2754	2,5799

Sumber: Hasil olahan data sekunder (2024)

Hasil menunjukkan jika data lebih memenuhi syarat dalam pengambilan keputusan yaitu $DU < DW$ ($4-DU$) = $1.4201 < 2.2754 < 2.5799$, maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak terdapat autokorelasi.

4.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada perbedaan dalam variasi antara sisa-sisa observasi dari satu observasi ke observasi lain dalam model regresi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glejser. diketahui nilai Sig. dari masing-masing variabel adalah sebesar 0.394 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, 0,235 untuk variabel Dana Alokasi Umum, 0,005 untuk variabel Dana Alokasi Khusus dan 0,245 untuk variabel Dana Bagi Hasil. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan, atau nilai Sig. lebih besar dari 0.05.

4.5 Uji Hipotesis

Analisis linier berganda

Tabel 3 Hasil regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	2,708	0,291	9,291	0,000
Pendapatan aslidaerah	0,223	0,250	0,098	0,377

Dana alokasi umum	-2,882	0,547	-0,620	-5,265	0,000
Dana alokasi khusus	0,305	0,335	0,095	0,910	0,367
Dana bagi hasil	0,112	0,791	0,015	0,0141	0,888

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dirumuskan persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,708 + 0,223 (X1) - 2,882 (X2) + 0,305 (X3) + 0,112(X3)$$

- Nilai konstanta sebesar 2,708 menunjukkan tanda positif berarti jika variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil dianggap nol, maka kinerja keuangan sebesar 2,708.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif sebesar 0,223 yang berarti jika variabel pendapatan asli daerah meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,223 dengan variabel lain di anggap konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai positif sebesar -2,882 yang berarti jika variabel dana alokasi umum meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan akan menurun sebesar - 2,882 dengan variabel lain di anggap konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai positif sebesar 0,305 yang berarti jika variabel dana alokasi khusus meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,305 dengan variabel lain di anggap konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel dana bagi hasil menunjukkan nilai positif sebesar 0,112 yang berarti jika variabel dana bagi hasil meningkat satu satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,112 dengan variabel lain di anggap konstan

4.6 Uji F

Tabel 4 Hasil uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0787	4	0,197	12,573	.000 ^b
	Residual	0,798	51	0,016		
	Total	1,585	55			

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2024)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai F sebesar 12,573 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikansi menunjukkan $\leq 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.6 Uji Statistik t

Tabel 5 Hasil uji t

Model	T hitung	Sig.	T tabel	Keterangan
1 (constant)	2,708	0,000	9,291	
Pendapatan asli daerah	0,223	0,377	0,891	H ₁ ditolak
Dana alokasi umum	-2,882	0,000	-5,265	H ₂ diterima
Dana alokasi khusus	0,305	0,367	0,910	H ₂ ditolak
Dana bagi hasil	0,112	0,888	0,141	H ₄ ditolak

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2024)

- Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasil pengujian hipotesis menunjukkan pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,223 dengan nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,891 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,00758 dengan tingkat signifikan sebesar $0,377 > 0,05$. Hal ini berarti Hipotesis ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023.
- Dana alokasi umum berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasil pengujian hipotesis menunjukkan dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,882 dengan nilai t hitung sebesar -5,265 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00758 dengan tingkat

signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023.

- c. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah hasil pengujian hipotesis menunjukkan dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,305 dengan nilai t hitung sebesar 0,367 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,00758 dengan tingkat signifikan sebesar $0,367 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023.
- d. Dana bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasil pengujian hipotesis menunjukkan dana bagi hasil memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,112 dengan nilai t hitung sebesar 0,141 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,00758 dengan tingkat signifikan sebesar $0,141 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023.

4.7 Uji Koefisien determinasi (dependen Adjust R²)

Tabel 6 Hasil uji koefisien (dependen Adjust R²)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	0,705 ^a	0,496	0,457		0,125102399

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder (2024)

Hasil tabel 5 koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,457 atau 45,7% artinya bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mampu mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 45,7% sedangkan sisanya sebesar 54,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tentunya tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Penelitian ini bernilai negative yang dimana hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap keuangan pemerintah Eks karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023. Yang menandakan bahwa pemerintah daerah belum optimal menampilkan kapabilitasnya dengan memiliki potensi yang kuat, menggali dan mengelola sumber daya belum maksimal, sehingga kontribusi pendapatan asli daerah semakin kecil dan penerimaan daerah belum dimaksimalkan. Dengan pemahaman ini, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri yang semakin meningkat, tidak lagi tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. [15] juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.8.2 Pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah

DAU yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta ini dikarenakan berbagai faktor di antaranya adalah Efektivitas DAU sangat tergantung pada bagaimana dana tersebut direncanakan, dikelola, dan diawasi. Tanpa perbaikan dalam manajemen keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas, serta mekanisme alokasi yang lebih tepat sasaran, sulit bagi DAU untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. DAU adalah sumbangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna mendukung kebutuhan lokalnya. Semakin besar jumlah dana alokasi umum yang diterima, semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, serta mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan.

4.8.3 Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Penelitian ini bernilai negative yang mana hipotesis ditolak dan dapat disimpulkan variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terjadi karena alokasi keuangan dari pemerintah pusat yang disediakan untuk mendukung kegiatan spesifik belum dianggap sebagai prioritas nasional. DAK digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur jembatan, pengadaan peralatan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta memberikan bantuan operasional kepada

sekolah. Namun, meskipun demikian, kontribusi DAK terhadap kinerja keuangan belum sepenuhnya signifikan. Semakin besar dana alokasi khusus yang diperoleh maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mencerminkan tingkat kemandirian keuangan yang baik.

4.8.4 Pengaruh dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pada variabel ini hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap keuangan Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023. DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Eks Karesidenan Surakarta disebabkan oleh variasi yang belum signifikan dalam kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi spesifik masing-masing daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi keberadaan sumber daya alam yang kaya atau sebaliknya, tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi atau rendah, serta tanggung jawab untuk memastikan pencapaian standar minimum dalam pelayanan di setiap wilayah. Oleh karena itu, dana bagi hasil dapat berperan dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hal ini juga mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemandirian daerah tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah eks karesidenan surakarta tahun anggaran 2016-2023. berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016- 2023. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2016-2023. Saran pada penelitian ini peneliti memberikan saran untuk pemerintah daerah untuk terus mengembangkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sumber sumber, pemerintah daerah duharapkan bisa mengeloa pendapatan daerah dengan efisien, dan untuk penrliti selanjutnya diharapkan supaya mengambil populasi selain Eks karesidenan Surakarta dan menambah variabel yang bervariasi serta lengkap.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini penulis banyak mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak oleh sebab itu penulis mengucapkan termakasih yang sedalam dalamnya kepada semua pihak sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Yunian, E., & HandayaPradanani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2(2), pp. 192–209, 2023, doi: <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>.
- [2] Mardiasmo, "Perpajakan (Revisi 201),” *Andi*, 2011.
- [3] Y. Pratiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Paradigma*,” vol. 19(2), pp. 105–112., 2017.
- [4] & A. N. R. Citra Nusa Afianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Senkim*,” *J. Unilak*, vol. 2(1), pp. 225–237, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/11337/4276>
- [5] & F. Abdullah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan,” *J. Univ. Bengkulu*, 2015.
- [6] S. Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*,” vol. 14 (1), pp. 44–52, 2018.
- [7] Y. P. Mutiara, A., & Astuti, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*,” vol. 1(1), pp. 12–24, 2020.
- [8] N. Yunian, E., & HandayaPradanani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

- Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, vol. 2(2), pp. 192–209, 2023, doi: 10.24034.
- [9] & S. Fatmawati, T. O., “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,” *J. Ilmu dan Reset Akuntansi*, vol. 9(4), pp. 1–20, 2020.
- [10] F. R. N. Hafidhah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tax Effort Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021),” *Univ. Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2023.
- [11] L. Dinah, S., & Darsono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal,” *Diponegoro J. Account.*, vol. 12(3), pp. 1–13., 2023.
- [12] Sari., “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon,” vol. 3(1), 2016.
- [13] A. Halim, “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.),” *Salemba Empat*, 2012.
- [14] Susanti, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau,” *J. Akunt. Univ. Marit. Raja Ali Haji*, vol. 1(1), pp. 1–17, 2018.
- [15] N. Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020,” *J. Akunt. Malikussaleh*, vol. 1(1), p. 64, 2022.